

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara (UUD 1945 Pasal 29). Realitasnya banyak masyarakat yang ingin sekolah tapi terbentur dengan biaya pendidikan. Anak-anak usia sekolah banyak yang menjadi pengangguran akibat putus sekolah bahkan ada yang tidak pernah memperoleh pendidikan. Semua itu terjadi karena tidak memiliki uang untuk membiayai pendidikan. Disisi lainnya setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti program belajar 9 tahun, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Dalam buku panduan BOS Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orang tua siswa yang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang yang menyadari hal itu. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berkontribusi secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib 9 Tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggarakannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Upaya peningkatan mutu Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah direncanakan baik sebelum Otonomi Daerah maupun sesudah Otonomi Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan menengah pada setiap jenjang satuan Pendidikan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan. Terkait dengan hal itu merupakan salah satu program dari pemerintah untuk pendidikan di Indonesia yaitu pengadaan dana bos yang disebut sebagai BOS. Dana Bos merupakan salah satu penunjang untuk terlaksananya suatu kebutuhan dari Sekolah ataupun sebagai bantuan bagi Peserta didik dalam hal ini Siswa. Bantuan dari pemerintah pusat diperuntukkan agar memberikan suatu kontribusi dan pelayanan yang baik

terhadap dunia pendidikan di Indonesia agar tercapainya target dari program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Dengan ini BOS ini akan semakin baik bagi penanggulangan masalah administrasi di Sekolah.

Sekolah dalam konteks pendidikan merupakan pihak utama dalam penggunaan dana bantuan dari Pemerintah ini agar tujuan terlaksana tepat sasaran, namun nampaknya kurang menuju sasaran yang ingin dicapai seutuhnya, dimana Dana Bantuan Operasional Sekolah ini harus terlaksana dengan baik. Guru dalam hal ini sebagai Pelaksana kegiatan Pengajaran harus melaksanakan tugas yang diembannya harus dengan tulus dan berdasarkan kaidah Pembelajaran yang baik apalagi di tambah dengan keterbatasan orangtua atau masyarakat tidak mampu dalam menyekolahkan anak sehingga dana bantuan sekolah harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran agar kepedulian anak untuk mengencam Pendidikan lebih meningkat serta Program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Segala bentuk penggunaan biaya Operasional Sekolah itu harus ditunjang dengan Penggunaan Dana BOS. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Peneliti berminat untuk mengadakan suatu Penelitian dan tinjauan lapangan terkait dengan Pengelolaan BOS dengan baik atau tidak tepat sasaran, karena ketika melihat adanya Bantuan dana yang mengarah untuk Operasional Sekolah tentunya Sekolah tersebut harus memiliki kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran dana BOS baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta sekolah melalui lembaga yang independent agar penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sesuai

dengan tujuan, sasaran dan manfaatnya tercapai. Dan selain itu pemerintah harus menggunakan pihak ketiga sebagai pendampingan guna membantu sukses dan tercapainya penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS di sekolah.

Adapun faktor lain penyebab siswa putus sekolah, bisa dibilang menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasinya, rendahnya motivasi belajar, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir siswa akan banyak di pengaruhi oleh siswa. Dikaitkan dengan tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah. Misalnya dengan memperbesar indeks dana BOS, memperkuat fokus pembiayaan pada siswa, atau memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh pihak sekolah. Pembesaran indeks dana BOS, jika dikaitkan dengan masih adanya siswa putus sekolah itu, didasarkan pada asumsi kesulitan keluarga (petani atau buruh) dalam menyediakan dana tunai.

Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya Permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi masih banyak dapat kita temukan berbagai kendala penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah yang muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS dan mengenai pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Terkadang sistem yang di harapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan berbagai masalah baru. Pada Tahun 2012 Dana (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana. Pada tahun Anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan

melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah Provinsi.

Kelemahan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan Dana (BOS) di sekolah adalah 1). Kurangnya tingkat efisiensi dalam proses pengalokasian dana Bantuan Operasional sekolah (BOS). 2). Kurang efektifnya kepala sekolah dan guru dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. 3). Banyaknya kesibukkan kepala sekolah dan guru mengakibatkan hilangnya kepedulian atas bantuan yang diberikan untuk siswa yang berhak menerima. 4). Komunikasi yang terbatas baik kepala sekolah dan guru ataupun guru dan siswa dalam pemberian Dana Bantuan tersebut. 5). Rendahnya kesadaran guru dalam mengoptimalkan dana bantuan untuk kebutuhan Siswa yang kurang mampu. 6) Kurangnya kemampuan guru untuk melihat siswa yang berhak atau tidak berhak menerima dana bantuan sekolah. 7) Kurang tegasnya guru dalam pemberian dana bantuan Sekolah mengakibatkan tidak merata pembagian siswa untuk memenuhi kebutuhan Sekolah. 8). Kurangnya Komunikasi Kepala Sekolah/Guru kepada Siswa penerima dalam penggunaan dana Bantuan Sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan; dan 2) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009).

Dalam kegiatan observasi awal ditemukan di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai pada hari Senin 10-2014 Bahwa kurangnya komunikasi oleh stakholder kepada komite sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan kurang optimalnya pengelolaan BOS. Hal tersebut di atas merupakan landasan yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah” di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian ini, maka fokus masalah yang ingin diamati antara lain:

- a. Perencanaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai
- b. Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai
- c. Pelaporan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai
- d. Akuntabilitas pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai.
- c. Untuk mengetahui Pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai

- d. Untuk mengetahui akuntabilitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti ini dapat dilihat dalam 2 konteks, antara lain :

Secara Teoritis, terdiri :

- a) Bagi Kepala Sekolah adalah agar lebih transparan dalam mengelola atau merencanakan BOS.
- b) Bagi Komite sekolah agar lebih jelas dalam penganggaran dana BOS di sekolah.
- c) Bagi Siswa agar siswa dapat memahami Penggunaan Dana BOS untuk kepentingan Pendidikan dan Menggunakannya dengan sebaik mungkin.
- d) Bagi Guru adalah Guru sebagai Pelaksana Pembelajaran harus lebih baik melihat kebutuhan Siswa yang kurang mampu dan mendapatkan pendidikan yang merata diantara Peserta Didik.

Secara Praktis , terdiri :

- a). Bagi Sekolah

Sekolah akan lebih baik dalam pengelolaan secara merata dan tepat sasaran terkait dengan Dana BOS serta sesuai dengan sasaran dari Program Dana BOS tersebut.

- b). Bagi Peneliti

Agar Peneliti dapat mengetahui proses penggunaan Dana BOS serta menjadikan Pelajaran dalam Pengelolaan suatu bantuan Operasional.